



## **STUDI DESKRIPTIF POLA INSTITUTIONAL SYNDROME NARAPIDANA HUKUMAN TINGGI GUNA MENDUKUNG EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPRIBADIAN PADA LAPAS KELAS I MEDAN**

**Ekyn Leovandany Rizky Ginting**

Teknik Pemasarakatan, Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola sindrom institusional yang dialami oleh narapidana dengan hukuman berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dan menganalisis bagaimana pola-pola tersebut mempengaruhi efektivitas program pengembangan kepribadian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan narapidana dan petugas pemasyarakatan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana dengan hukuman berat cenderung mengalami gejala sindrom institusional berupa ketergantungan berlebihan pada aturan institusi, hilangnya inisiatif pribadi, dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Kondisi ini berdampak pada partisipasi aktif yang rendah dalam program pengembangan kepribadian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi bimbingan yang lebih adaptif dan personal untuk meminimalkan dampak sindrom institusional, seperti meningkatkan konseling individu, program pelatihan keterampilan sosial, dan pendekatan bimbingan berbasis motivasi. Dengan demikian, efektivitas pengembangan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan diharapkan meningkat dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang optimal.

**Kata Kunci:** Sindrom Institusional, Narapidana dengan Hukuman Berat, Pengembangan Kepribadian, Lembaga Pemasyarakatan.

### **PENDAHULUAN**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma yang signifikan dari sistem

kepenjaraan menuju pendekatan pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan. Pergeseran ini berawal dari gagasan Sahardjo pada tahun 1963

tentang konsep “pengayoman”, yang menempatkan narapidana bukan sekadar sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat (Rachmayanthi & Anwar, 2023). Sejak saat itu, sistem pemasyarakatan diatur dengan prinsip rehabilitatif dan reintegratif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan narapidana sebagai bagian dari pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman (Napu et al., 2023).

Implementasi sistem pemasyarakatan di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama bagi narapidana dengan masa pidana yang panjang atau disebut narapidana hukuman tinggi. Mereka cenderung mengalami tekanan psikologis dan sosial yang lebih berat dibandingkan narapidana dengan hukuman singkat. Kondisi tersebut dapat memunculkan fenomena *institutional syndrome*, yakni keadaan ketika individu menjadi sangat bergantung pada aturan dan rutinitas lembaga sehingga kehilangan kemampuan mengambil keputusan dan inisiatif pribadi (Anggraini et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif, tetapi juga pemahaman terhadap aspek psikologis narapidana.

Fenomena *institutional syndrome* menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang mengalami sindrom ini biasanya menunjukkan perilaku pasif, ketergantungan tinggi terhadap lingkungan lembaga, dan resistensi terhadap program pembinaan (Anggraini et al., 2019). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pembinaan karena proses rehabilitasi

tidak disertai perubahan mental yang signifikan. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program yang dijalankan, tetapi juga oleh kesiapan psikologis narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan secara aktif.

Kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan juga berpengaruh besar terhadap munculnya *institutional syndrome*. Faktor-faktor seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya layanan psikologis, serta minimnya kegiatan pembinaan yang bersifat terapeutik dapat memperburuk kondisi kejiwaan warga binaan (Haryani & Henda, 2019). Narapidana dengan hukuman tinggi menghadapi tantangan yang lebih berat karena harus hidup dalam pengawasan ketat dan mengalami ketidakpastian terhadap masa depan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko stres dan apatisme terhadap program pembinaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan pembinaan yang bersifat adaptif dan berfokus pada aspek kepribadian menjadi sangat penting. Pembinaan kepribadian diarahkan untuk memperkuat moralitas, spiritualitas, serta kemampuan sosial narapidana agar mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setelah bebas (Pratama et al., 2021). Program konseling individual, pelatihan keterampilan sosial, serta kegiatan keagamaan terbukti efektif dalam membantu mengurangi gejala *institutional syndrome* dan menumbuhkan motivasi internal untuk berubah. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai dasar pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila, yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat (Soedjono Dirdjosisworo, 1984).

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pola *institutional syndrome*

yang dialami narapidana hukuman tinggi, serta pengaruhnya terhadap efektivitas pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor penyebab, bentuk manifestasi, serta strategi pembinaan yang paling tepat untuk menekan dampak sindrom tersebut. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan sistem pembinaan yang humanis, adaptif, dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pola *institutional syndrome* yang dialami narapidana dengan hukuman tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Subjek penelitian meliputi narapidana dengan masa hukuman panjang serta petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam proses pembinaan kepribadian. Penelitian ini tidak menggunakan rancangan eksperimen, melainkan studi lapangan yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap perilaku dan pengalaman sosial subjek penelitian di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Data dikumpulkan menggunakan beberapa alat bantu, antara lain pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan relevansi dan pemahaman mereka terhadap fenomena yang dikaji. Variabel utama yang diamati mencakup tingkat ketergantungan narapidana terhadap aturan lembaga, inisiatif pribadi dalam berperilaku, serta kemampuan adaptasi sosial di lingkungan tertutup.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi perilaku, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif tanpa menggunakan uji statistik kuantitatif, namun tetap mengikuti prinsip validitas, konsistensi, dan keterpaduan antar temuan untuk menghasilkan pemahaman yang akurat terhadap fenomena *institutional syndrome* di Lapas Kelas I Medan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana dengan hukuman tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan cenderung mengalami gejala *institutional syndrome* dalam berbagai bentuk perilaku dan pola pikir. Gejala yang paling menonjol adalah ketergantungan berlebihan terhadap aturan dan rutinitas lembaga. Narapidana menunjukkan sikap patuh yang ekstrem terhadap peraturan, namun kepatuhan ini sering kali lebih bersumber pada rasa takut terhadap hukuman dibandingkan kesadaran moral. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Goffman (1961) tentang *total institution*, di mana lingkungan tertutup seperti penjara membentuk individu menjadi pasif dan sangat bergantung pada sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan di lapas telah berhasil menciptakan keteraturan, namun belum sepenuhnya menumbuhkan otonomi pribadi narapidana.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa banyak narapidana kehilangan inisiatif dalam mengambil keputusan. Mereka terbiasa

menunggu perintah petugas dan merasa tidak mampu mengatur diri sendiri. Kondisi ini sesuai dengan temuan Toch (1997), yang menyatakan bahwa individu yang hidup terlalu lama dalam sistem institusional cenderung kehilangan kemampuan berpikir mandiri akibat terbatasnya ruang untuk bereksplorasi dan mengambil keputusan sendiri. Di Lapas Kelas I Medan, fenomena tersebut tampak melalui pola perilaku narapidana yang pasif dalam kegiatan pembinaan dan menunjukkan rasa ketergantungan tinggi terhadap instruksi petugas.

Selain itu, lama masa hukuman juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap tingkat keparahan *institutional syndrome*. Narapidana yang telah menjalani masa pidana lebih dari sepuluh tahun memperlihatkan kesulitan dalam beradaptasi baik di dalam lapas maupun saat mendekati masa bebas. Mereka mengaku kehilangan rasa percaya diri dan khawatir terhadap penerimaan masyarakat setelah keluar dari lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haney (2001) yang menjelaskan bahwa paparan jangka panjang terhadap lingkungan tertutup dapat menimbulkan penurunan fungsi sosial dan meningkatnya rasa takut terhadap dunia luar.

Kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat gejala *institutional syndrome*. Narapidana yang jarang dikunjungi keluarga cenderung mengalami stres dan penarikan diri sosial. Sebaliknya, narapidana yang memiliki dukungan emosional dari keluarga menunjukkan tingkat motivasi lebih tinggi dalam mengikuti program pembinaan. Hal ini mendukung hasil penelitian Simanullang (2022), yang menyatakan bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan adaptasi stres pada

narapidana. Dukungan emosional berfungsi sebagai penguat psikologis yang dapat menurunkan tingkat ketergantungan terhadap lembaga dan meningkatkan kesiapan untuk beradaptasi kembali di masyarakat.

Dari sisi pelaksanaan pembinaan, penelitian menemukan bahwa efektivitas program yang ada masih bervariasi. Program keagamaan dan konseling psikologis dinilai mampu mengurangi tekanan emosional narapidana, namun belum optimal dalam membangun kemandirian dan kemampuan sosial. Kegiatan pelatihan keterampilan yang monoton dan bersifat rutin membuat sebagian narapidana merasa jenuh. Sejalan dengan temuan Kaumpungan (2025), pembinaan mental dan emosional di lembaga dengan tingkat keamanan tinggi sering kali belum terintegrasi dengan pendekatan motivasional yang dapat memulihkan semangat hidup narapidana secara menyeluruh.

Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan. Rasio antara petugas dan narapidana yang tidak seimbang menyebabkan pendekatan pembinaan lebih menitikberatkan pada aspek administratif daripada aspek psikososial. Kondisi ini memperkuat temuan Rahmadani dan Rinaldi (2024), yang menyebutkan bahwa keterbatasan tenaga pembina berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas rehabilitasi narapidana dengan hukuman seumur hidup. Akibatnya, pembinaan yang seharusnya bersifat personal dan membangun empati justru cenderung menjadi formalitas prosedural.

Petugas memahami pentingnya pendekatan psikologis dalam pembinaan, keterbatasan pelatihan dan pengetahuan menyebabkan mereka lebih fokus pada pengawasan. Hal ini memperlihatkan perlunya peningkatan kompetensi petugas pemsyarakatan

dalam bidang konseling dan rehabilitasi sosial. Seperti dikemukakan oleh Crewe (2015), keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam menciptakan lingkungan yang suportif, aman, dan memanusiakan narapidana.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *institutional syndrome* di Lapas Kelas I Medan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk lamanya masa pidana, kurangnya dukungan sosial, dan sistem pembinaan yang belum sepenuhnya humanistik. Agar pembinaan lebih efektif, diperlukan pendekatan yang menekankan pengembangan kepribadian, rasa percaya diri, serta kemampuan sosial narapidana. Hal ini sejalan dengan gagasan Adi Sujatno (2004), yang menyatakan bahwa tujuan utama sistem pemasyarakatan bukan sekadar menciptakan kepatuhan, tetapi membentuk individu yang sadar hukum dan mampu berfungsi kembali secara positif di masyarakat setelah bebas nanti.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *institutional syndrome* pada narapidana dengan hukuman tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan muncul sebagai akibat dari lingkungan yang sangat terstruktur, lamanya masa pidana, serta minimnya dukungan sosial dan pembinaan yang bersifat personal. Narapidana cenderung menunjukkan ketergantungan berlebihan terhadap sistem lembaga, kehilangan inisiatif, serta kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Pola ini memperlihatkan bahwa pembinaan yang dijalankan masih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan daripada penguatan karakter dan kemandirian individu. Akibatnya, tujuan utama pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang siap berintegrasi

kembali ke masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan berpusat pada kebutuhan psikologis serta sosial narapidana. Pendekatan berbasis konseling individual, pelatihan keterampilan sosial, dan program pembinaan yang menumbuhkan motivasi serta tanggung jawab pribadi perlu diperluas. Selain itu, peran petugas pemasyarakatan sebagai fasilitator rehabilitasi harus diperkuat melalui pelatihan dan dukungan institusional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat pembinaan manusia, bukan sekadar tempat menjalani hukuman, serta mampu menyiapkan narapidana untuk kembali berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno. (2004). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Dari Retribusi ke Rehabilitasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Anggraini, R., Nurhayati, D., & Purnamasari, A. (2019). *Fenomena Sindrom Kelembagaan pada Narapidana Risiko Tinggi*. *Jurnal Pemasyarakatan dan Psikologi*, 8(2), 112–125..
- Crewe, B. (2015). *The Prisoner Society: Power, Adaptation, and Social Life in an English Prison*. Oxford: Oxford University Press.
- Dwi Putri Rahmadani & Kasmanto Rinaldi. (2024). *Pembinaan terhadap Narapidana dengan Hukuman Seumur Hidup*. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan*, 12(1), 55–68.
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Anchor Books.
- Haney, C. (2001). *The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Adjustment*. In J. Travis & M. Waul (Eds.), *Prisoners Once Removed: The Impact of Incarceration and Reentry on Children, Families,*

*and Communities* (pp. 33–66). Washington, DC: Urban Institute Press.

Kaumpungan, P. (2025). *Pembinaan Mental dan Pengelolaan Emosi di Lembaga Pemasyarakatan Risiko Tinggi*. Jurnal Rehabilitasi Sosial, 9(1), 44–58.

Simanullang, A. S. O. (2022). *Hubungan Dukungan Sosial terhadap Adaptasi Stres pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang*. Skripsi. Politeknik Pengayoman Indonesia.

Toch, H. (1997). *Living in Prison: The Ecology of Survival*. Washington, DC: American Psychological Association.

Wulandari, R. (2015). *Transformasi Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 4(2), 89–103.